

Kedudukan majelis kehormatan notaris dalam penyidikan terhadap notaris: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.19/Pid.Pra/2016/Pn. Jkt.Pst = Position of honorary board of notaries in investigation of notaries: case study of decision of the Central Jakarta District Court No.19/Pid.Pra/2016/Rev. Jkt.Pst

Novita Dwi Handayani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20493775&lokasi=lokal>

Abstrak

Majelis Kehormatan Notaris, memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap notaris, yang mencakup pemanggilan notaris guna kepentingan pemeriksaan sebagai saksi atau tersangka, pengambilan photocopy minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta, dan pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris menjadi dasar kewenangan bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris dan alasan pemberanakan notaris untuk membuka rahasia jabatan tanpa dikenakan sanksi hukum. Parameter bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik, tidak meliputi seluruh kewenangan notaris yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan juga tidak mencakup penilaian ada atau tidak adanya kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya dan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lainnya. Prosedur dalam penyidikan terhadap notaris, dapat mengakibatkan bukti bukti dari hasil penyidikan notaris menjadi tidak sah dan memberikan peluang untuk dilakukannya praperadilan. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji parameter dalam memberikan persetujuan atau penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, serta prosedur penyidikan terhadap notaris dan akta aktanya, yang dijadikan bukti dalam perkara pidana.

<hr>

The Honorary Board of Notaries, has the authority to give approval or appreciation to investigators for education, notaries, which involve calling a notary, according to a request or suspect, taking a copy of the deed and/or letter attached to the minuta deed, and taking a minuta deed and or letter of letter attached to the minuta deed. The Honorary Board of Notarys approval was the basis for the investigator to conduct an investigation of the notary and the notarys justification for disclosing licensing secrets without asking for legal permission. Parameters for the Honorary Assembly in giving approval or approval to the investigator, do not need an agreement with the agreement stipulated in the Act of Notary Position and also do not discuss the presence or absence of errors in its implementation and deny related to the request for other invitations. The procedure in investigating a notary can request proof of approval from the results of a notary investigation to be invalid and provide an opportunity for pretrial approval. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the parameters in giving approval or approval by the Notary Honorary Assembly which is regulated in the Act of Notary Position and its implementation rules, as well as procedures for investigating notaries and deed deeds, which are used as evidence in sentence cases.